



# **RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN BADUNG**



**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

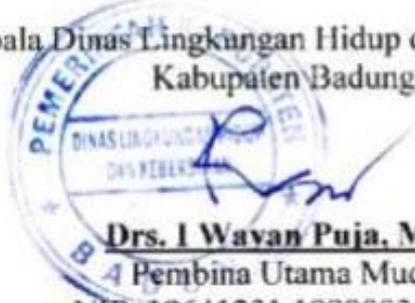
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dokumen rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung yang memuat sasaran Program, kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini memaparkan agenda kerja dan target kinerja tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan dari masing-masing Bidang dan/atau Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini juga sebagai penjabaran operasional kegiatan di Tahun 2024 dan menjadi acuan serta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Mangupura, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung



**Drs. I Wawan Puja, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 1999003 1 165

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	I-2
1.3 Landasan Hukum.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II RENCANA STRATEGIS .....	II-1
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	II-1
2.2 Struktur Organisasi .....	II-1
2.3 Sumber Daya Manusia .....	II-3
2.4 Tujuan dan Sasaran.....	II-3
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	III-1
3.1. Program dan Kegiatan .....	III-1
3.2 Indikator Kinerja.....	III-6
BAB IV PENUTUP.....	IV-1
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Formasi Pegawai DLHK Kabupaten Badung.....	II-3
--	------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLHK Kabupaten Badung.....	II-2
---	------

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerjanya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu : Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026, telah ditetapkan bahwa Visi

pembangunan di Kabupaten Badung adalah *“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana”*. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi, salah satunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, adalah Misi 3 (tiga) yaitu *“Mewujudkan Tatahan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)”* dan Misi 8 (delapan) yaitu *“Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam”*. Dalam rangka mencapai tujuan Misi tersebut, DLHK Kabupaten Badung telah menyusun beberapa rencana program dan kegiatan strategis bidang urusan lingkungan hidup yang menitikberatkan pada pengendalian dampak lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung serta perubahannya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 DLHK Kabupaten Badung ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi/lembaga pemerintah berdasarkan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI., Nomor : 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan menjadi penjabaran dari Rencana Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dan menjadi acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan untuk penyelenggaraan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung..
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatkan ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

### **1.3 Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Bupati Badung Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKT, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum yang digunakan untuk penyusunannya, dan sistematika penulisan dokumen RKT ini.

##### **2. BAB II RENCANA KERJA**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai, program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

##### **3. BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Menjabarkan rencana program dan kegiatan serta target indikator kinerja yang ditentukan pada tahun 2024

##### **4. BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS**

#### **2.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas pokok dibidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

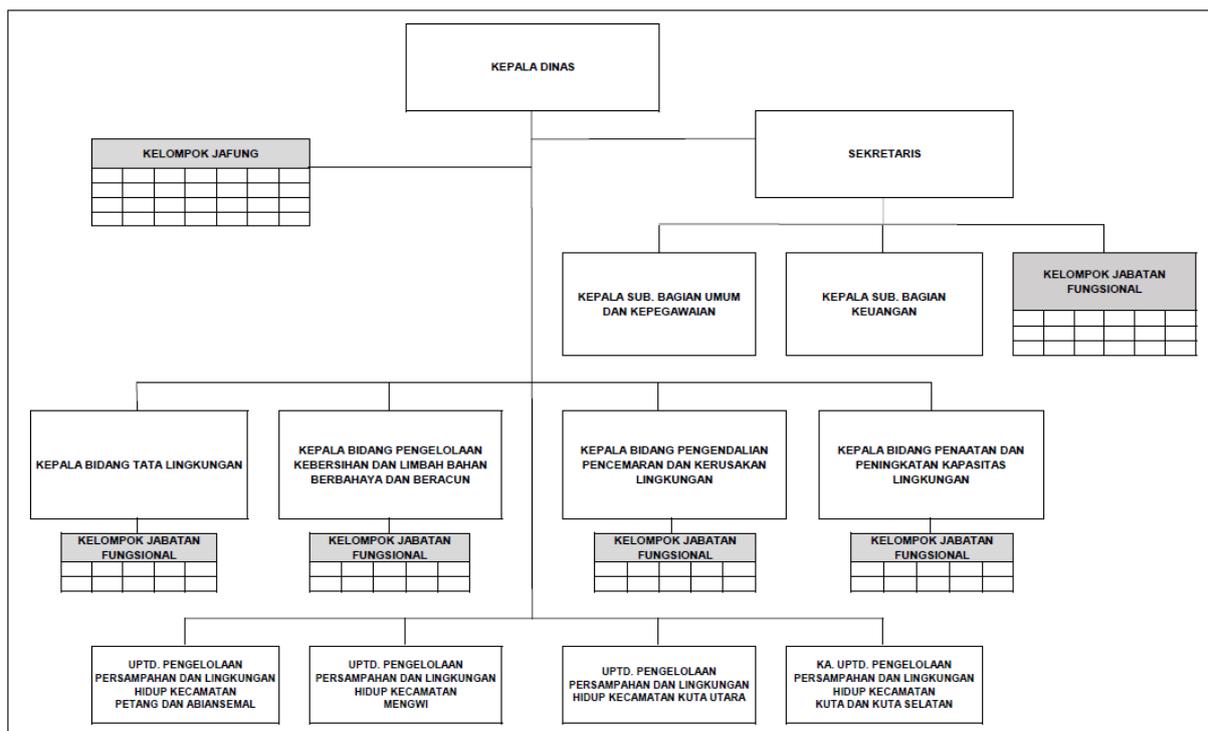
1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.2 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Keuangan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari
  - a. UPT Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup - Petang dan Abiansemal.
  - b. UPT Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup - Mengwi
  - c. UPT Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup - Kuta Utara
  - d. UPT Pengelolaan Persampahan dan Lingkungan Hidup - Kuta dan Kuta Selatan
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLHK Kab. Badung

## 2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang lingkungan hidup di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta dibantu 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan jumlah pegawai pada Tahun 2024 sebanyak 1.120 (seribu seratus dua puluh) orang sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	251 Orang
2.	Tenaga Harian Lepas	12 Orang
3.	Tenaga Kontrak	857 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.120 Orang</b>

*Tabel 2.1 Formasi Pegawai DLHK Kab. Badung*

## 2.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam mensinergikan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung, telah disusun rencana program dan kegiatan strategis bidang urusan lingkungan hidup dengan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya lingkungan yang bersih dan hijau
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi
3. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
4. Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman

## **BAB III**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

#### **3.1 Program dan Kegiatan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Badung yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan mensinergikan visi misi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Untuk mencapai tujuan tersebut, DLHK Kabupaten Badung melaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Kegiatan :
    - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten
    - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  
Kegiatan :  
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
  3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3).  
Kegiatan :
    - a. Penyimpanan sementara Limbah B3
    - b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).  
Kegiatan :  
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.  
Kegiatan :  
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
-

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  
Kegiatan :  
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  
Kegiatan :  
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
8. Program Pengelolaan Persampahan  
Kegiatan :  
Pengelolaan Sampah
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung melaksanakan 9 (sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan serta 40 (empat puluh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.  
Kegiatan :
  - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten  
Sub. Kegiatan :
    - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
    - 2) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
  - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  
Sub. Kegiatan :

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  
Sub. Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Kegiatan :

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

- 1) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati
- 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan :

- a. Penyimpanan sementara Limbah B3

Sub. Kegiatan :

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

- b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan :

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 2) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan

Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Kegiatan :

Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Sub. Kegiatan :

Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- 2) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

8. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

Pengelolaan Sampah

Sub. Kegiatan :

- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 3) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat

pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

4) Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pengadaan Mebel

3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### **3.2 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja merupakan suatu alat untuk menentukan ukuran pencapaian suatu sasaran, program atau kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, maka Indikator Kinerja dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
4. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
5. Persentase Akuntabilitas Kinerja Instansi
6. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
7. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung

## **BAB IV**

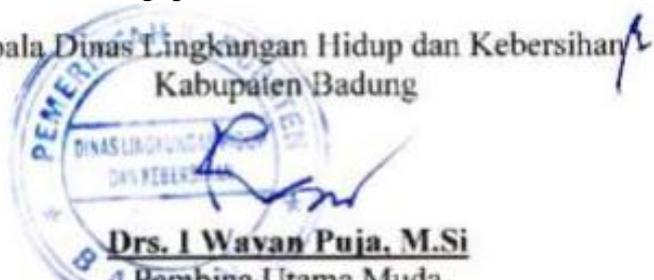
### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan besaran yang terukur, disertai dengan kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2024 disusun, dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target pada Tahun 2024 dan mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis bidang urusan lingkungan hidup yang menitikberatkan pada pengendalian dampak lingkungan hidup dan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Badung.

Mangupura, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung



**Drs. I Wawan Puja, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 1999003 1 165

**TABEL**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PROGRAM (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau	Indeks Kualitas Air (IKA)  Indeks Kualitas Udara (IKU)  Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	18.95  36.86  5.91	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan	<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</p> <p>b. Koordinasi, Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK</p> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.</p>	3/5	1.224.909.282

				<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi</p>		
			<p>Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</p>	<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3</p> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</p>	2/2	327.053.719
			<p>Program Pengelolaan Persampahan</p>	<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>Pengelolaan Sampah</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p>	1/4	142.059.765.666

					<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</li> <li>c. Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</li> <li>d. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah</li> </ul>		
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi	Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%	<p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p>	<p><i>Kegiatan :</i> Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i> Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH</p>	1/1	742.923
				<p>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p>	<p><i>Kegiatan :</i> Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p>	1/1	29.238.191

					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
		Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p><i>Kegiatan :</i></p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <p>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <p>a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p>	6/21	49.140.252.388

				<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</li> </ul> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>b. Pengadaan Mebel</li> <li>c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> </ul> <p><i>Kegiatan :</i></p> <p>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p><i>Sub. Kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</li> <li>d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> </ul>		
3.	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<p><i>Kegiatan :</i> Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</li> <li>b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>	1/2	985.843.146
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<p><i>Kegiatan :</i> Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</p> <p><i>Sub Kegiatan :</i></p>	1/2	507.553.811

					<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota</li> <li>b. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota</li> </ul>		
4.	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman	Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	<i>Kegiatan :</i> Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota <i>Sub Kegiatan :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati</li> <li>b. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ul>	1/2	14.332.712.518
<b>JUMLAH</b>	<b>4 Sasaran Strategis</b>	<b>7 Indikator Kinerja Sasaran Utama</b>		<b>9 Program</b>	<b>17 Kegiatan dengan 40 Sub Kegiatan</b>	<b>17/40</b>	<b>213.008.038.579</b>

Mangupura, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Badung

**Drs. I Wayan Puja, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641231 1999003 1 165

# RKT

Tahun: 2024

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
1	<b>TUJUAN: Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih dan Hijau</b>			<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>
	Tujuan indikator tidak ada.	Nilai	-	
		Rp.	208.014.806.396	
	<b>SASARAN: Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau</b>			<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	18.95	
		Rp.	142.066.732.662	
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	36.86	
		Rp.	1.224.909.282	
	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai	5.91	
		Rp.	28.207.800	
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>
	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase	100	
		Rp.	1.224.909.282	
	<b>KEGIATAN: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			<b>Bidang Tata Lingkungan</b>
	jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	6	
		Rp.	898.591.499	
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</b>			<b>Bidang Tata Lingkungan</b>
	jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Rp.	781.188.402	
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>			<b>Bidang Tata Lingkungan</b>
	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi GRK dan Profil Emisi GRK	Rp.	117.403.097	
	<b>KEGIATAN: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			<b>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>
	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan	12	
		Rp.	135.011.381	
	<b>SUBKEGIATAN: Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</b>			<b>Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Rp.	135.011.381	
	<b>KEGIATAN: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	Dokumen	12	
		Rp.	191.306.402	
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar</b>			Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Rp.	95.653.201	
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi</b>			Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp.	95.653.201	
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase terkendalinya Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Presentase	100	
		Rp.	28.207.800	
	<b>KEGIATAN: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
	Jumlah dokumen Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	
		Rp.	14.103.900	
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</b>			Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan P	Rp.	14.103.900	
	<b>KEGIATAN: Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>			Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
	Jumlah Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan	150	
		Rp.	14.103.900	
	<b>SUBKEGIATAN: Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>			Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Rp.	14.103.900	
<b>PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>
	Persentase terkelolanya persampahan	Presentase	100	
		Rp.	142.066.732.662	
<b>KEGIATAN: Pengelolaan Sampah</b>				<b>Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>
	Persentase Terkelolanya Sampah	Presentase	100	
		Rp.	142.066.732.662	
<b>SUBKEGIATAN: Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali</b>				<b>Seksi Pengurangan Sampah</b>
	Jumlah Sampah yang Terdaur Ulang	Rp.	2.114.727.679	
<b>SUBKEGIATAN: Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>				<b>Seksi Penanganan Sampah</b>
	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah, TPS3r, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp.	105.622.611.786	
<b>SUBKEGIATAN: Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</b>				<b>Seksi Penanganan Sampah</b>
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp.	169.733.350	
<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</b>				<b>Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan AKhir	Rp.	34.159.659.847	
<b>SASARAN: Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi</b>				<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>
	Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	Presentase	100	
		Rp.	29.981.114	
	Persentase akuntabilitas kinerja instansi	Presentase	100	
		Rp.	64.664.975.538	
<b>PROGRAM: PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>				<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>
	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase	100	
		Rp.	742.923	

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	<b>KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>			Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dokumen	1	
		Rp.	742.923	
	<b>SUBKEGIATAN: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH</b>			Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Rp.	742.923	
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase	100	
		Rp.	29.238.191	
	<b>KEGIATAN: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga	3 Lembaga	
		Rp.	29.238.191	
	<b>SUBKEGIATAN: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</b>			Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Rp.	0	
	<b>SUBKEGIATAN: Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</b>			Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp.	29.238.191	
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase	100	
		Rp.	0	
	<b>KEGIATAN: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten	Entitas	-	
		Rp.	0	
	<b>SUBKEGIATAN: Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>			Seksi Pencemaran Lingkungan

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka	Rp.	0	
<b>PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>
	Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase	100	
		Rp.	64.664.975.538	
<b>KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>Sekretariat</b>
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	33	
		Rp.	28.457.000	
<b>SUBKEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>				<b>Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan</b>
	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Rp.	15.258.375	
<b>SUBKEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan</b>
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	13.198.625	
<b>KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>Sekretariat</b>
	Persentase Administrasi Keuangan PD	Presentase	100	
		Rp.	52.453.455.560	
<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>				<b>Sub Bagian Keuangan</b>
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	52.453.455.560	
<b>KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>Sekretariat</b>
	Jumlah paket kegiatan administrasi umum	Paket	7	
		Rp.	2.323.947.350	
<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>				<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Rp.	22.150.000	
<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>				<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp.	85.080.000	
<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>				<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Rp.	15.720.000	
<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>				<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp.	2.054.690.000	
<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>				<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rp.	57.450.000	
<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>				<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Rp.	80.100.000	
<b>SUBKEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu</b>				<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp.	5.000.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.	3.757.350	
	<b>KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Sekretariat
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	234	
		Rp.	2.326.280.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp.	162.820.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Rp.	162.820.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp.	1.775.330.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp.	28.490.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperlilhara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Rp.	162.820.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Pemeliharaan Mebel</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Rp.	34.000.000	
	<b>KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Sekretariat
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	24	
		Rp.	1.062.580.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	9.140.000	
	<b>SUBKEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp.	1.053.440.000	
	<b>KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Sekretariat
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	1	
		Rp.	6.470.255.628	
	<b>SUBKEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Rp.	22.300.000	

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	SUBKEGIATAN: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Rp.	6.274.866.648	
	SUBKEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp.	109.890.000	
	SUBKEGIATAN: Pengadaan Mebel			Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp.	63.198.980	
	<b>PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			Bidang Tata Lingkungan
	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	Nilai	0	
		Rp.	0	
	KEGIATAN: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Bidang Tata Lingkungan
	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	-	
		Rp.	0	
	SUBKEGIATAN: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			Bidang Tata Lingkungan
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Rp.	0	
2	TUJUAN: Terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Tujuan indikator tidak ada.	Nilai	-	
		Rp.	1.493.396.957	
	SASARAN: Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	Presentase	100	
		Rp.	1.493.396.957	
	<b>PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Presentase	100	
		Rp.	985.843.146	
	KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Dokumen	2	
		Rp.	985.843.146	
	SUBKEGIATAN: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi	Rp.	983.167.660	
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH</b>			Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Rp.	0	
	<b>SUBKEGIATAN: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Rp.	2.675.486	
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase	100	
		Rp.	507.553.811	
	<b>KEGIATAN: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>			Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen	2	
		Rp.	507.553.811	
	<b>SUBKEGIATAN: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</b>			Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	Jumlah Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti	Rp.	502.655.533	
	<b>SUBKEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp.	4.898.278	
3	<b>TUJUAN: Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman untuk terciptanya lingkungan yang hijau dan asri</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Tujuan indikator tidak ada.	Nilai	-	
		Rp.	18.732.679.453	
	<b>SASARAN: Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	Nilai	100	
		Rp.	18.732.679.453	
	<b>PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>			Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase	100	
		Rp.	18.732.679.453	
	<b>KEGIATAN: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>			Bidang Tata Lingkungan
	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	Hektar	10,694519 Ha	
		Rp.	18.732.679.453	
	<b>SUBKEGIATAN: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>			Bidang Tata Lingkungan

No.	Tujuan/Sasaran/Prog./Keg./Sub. Keg.	Satuan	2024	Penanggung Jawab
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp.	18.575.683.896	
<b>SUBKEGIATAN: Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>				<b>Bidang Tata Lingkungan</b>
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan KEHATI yang disusun	Rp.	156.995.557	